

# KEMISKINAN DI INDONESIA: PENGARUH PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

*Sri Liani Suselo*<sup>1</sup>  
*Tarsidin*<sup>2</sup>

## **Abstract**

*Poverty level of Indonesia remains high while the economy experiences relatively high and steady growth. The asymmetry is investigated, probing the poverty and economic growth-structure linkages at sectoral level. The result shows that agriculture sector is the highest contributors of poverty at almost all regions. It is also the most responsive sector, with its high growth elasticity of poverty reduction. On the other hand economic structure seems to have varying impacts on poverty at sectoral level.*

JEL Classification: O10, O49

*Keywords:* Poverty, economic growth, structure, sectoral level.

---

1 Sri Liani Suselo adalah *Senior Researcher* pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia; [sliani@bi.go.id](mailto:sliani@bi.go.id)

2 Tarsidin adalah *Visiting Researcher* pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia; [tarsidin@yahoo.co.id](mailto:tarsidin@yahoo.co.id)

## I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berkisar 5% - 6% per tahun, agaknya belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Bahkan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, yang saat ini berkisar 37 juta jiwa. Sementara itu studi dari Bank Dunia menyebutkan bahwa hampir 50% dari jumlah penduduk Indonesia dikategorikan "miskin" dan "berada di ambang kemiskinan". Hal ini menjadikan permasalahan kemiskinan patut mendapat perhatian yang besar dari semua pihak.

Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tentunya mengundang sejumlah pertanyaan, seperti: siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh peningkatan produktivitas ataukah penggunaan faktor produksi, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu sementara beberapa sektor lainnya pertumbuhannya relatif lambat sehingga tidak mampu menekan kemiskinan.

Di samping itu terjadi pula perubahan struktur perekonomian Indonesia. Peran sektor pertanian, yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia semakin menurun. Sementara itu sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi semakin meningkat *share*-nya. Perubahan struktur ini juga diduga turut berdampak, baik secara langsung maupun tidak, terhadap tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut menarik kiranya untuk dilakukan penelitian atas pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur perekonomian, dalam hal ini dengan mendekomposisinya menjadi pertumbuhan ekonomi sektoral dan dinamika yang terjadi seiring dengan adanya perubahan struktur perekonomian. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan fenomena peningkatan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Studi/penelitian ini diharapkan dapat menjawab 4 pertanyaan; (1) Bagaimana dekomposisi sektoral kemiskinan di Indonesia? Sektor-sektor usaha manakah yang berkontribusi paling besar terhadap tingginya angka kemiskinan Indonesia?, (2) Bagaimana pertumbuhan ekonomi sektoral Indonesia? Bagaimana perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral tersebut dapat menjelaskan fenomena tingginya angka kemiskinan Indonesia?, (3) Bagaimana pula perubahan struktur perekonomian Indonesia? Apakah perubahan struktur ekonomi tersebut turut berdampak pada tingginya angka kemiskinan Indonesia?, dan (4) Apakah solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut?

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh beberapa manfaat, *pertama*, bagi pengambil kebijakan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, dengan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi sektoral Indonesia terhadap kemiskinan sektoral akan dapat dijadikan

landasan dalam perumusan kebijakan, terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui kebijakan pembangunan sektoral. Demikian pula halnya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meminimisasi dampak buruk dari perubahan struktur perekonomian. *Kedua*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi lainnya mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.

## II. TEORI

### II.1. Tinjauan Literatur

Beberapa literatur terkait dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, beberapa faktor lain yang mempengaruhi, dan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk pengentasannya diuraikan berikut ini.

#### **II.1.1. Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Kemiskinan**

Beberapa studi untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kemiskinan telah banyak dilakukan. Hipotesis dari Kuznets (1955, 1963) menyebutkan bahwa proses pembangunan akan disertai dengan meningkatnya *inequality* secara substansial, yang akan berbalik hanya pada tahap perekonomian sudah maju (*advanced*). Hal tersebut juga disampaikan oleh Ahluwalia, Carter, dan Chenery (1979), di mana ada dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan meningkatnya *inequality* sehingga masyarakat miskin mendapat bagian yang kecil dari pertumbuhan ekonomi.

Upaya paling komprehensif untuk menguji hipotesis Kuznets dilakukan oleh Deininger dan Squire (1998), yang dengan kualitas data yang lebih baik hasilnya menunjukkan tidak adanya hipotesis *inverted-U* dari Kuznets. Pada kebanyakan kasus distribusi pendapatan selama beberapa dekade terakhir terlihat tidak banyak berubah. Beberapa studi lainnya antara lain dilakukan oleh Knowles (2001), yang mendapatkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara keduanya pada sejumlah negara berkembang, namun pada negara-negara lainnya tidak cukup ditemukan bukti tersebut. Sementara itu Ravallion dan Chen (1997) tidak menemukan adanya hubungan yang sistematis antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan, namun ditemukan adanya hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Pentingnya meneliti ketiganya secara bersamaan sebagai suatu identitas dikemukakan oleh Bourguignon (2002), yang mengidentifikasi adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan perubahan distribusi pendapatan. Terkait dengan ukuran

kemiskinan, Bigsten dan Shimeles (2005) menyebutkan adanya dua ukuran kemiskinan, yakni pendapatan per kapita dan *income-inequality*, sebagaimana juga disebutkan Kakwani (1991) dan Ravallion (1992).

### **II.1.2. Kondisi Ekonomi Makro dan Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di suatu negara tentunya tidak terlepas dari kinerja variabel-variabel ekonomi makro negara yang bersangkutan. Hal ini antara lain diteliti oleh Balke dan Slottje (1993), yang menguji hubungan antara variabel-variabel ekonomi makro dan tingkat kemiskinan di US. Di samping itu pengaruh korelasi antar negara juga turut berperan terhadap tingkat kemiskinan di suatu negara, sebagaimana disebutkan Ravallion (2001).

Balke dan Slottje (1993) menyimpulkan bahwa inflasi tidak mempunyai dampak terhadap kemiskinan, berbeda dengan pengangguran yang berdampak buruk pada kemiskinan. Variabel-variabel yang digunakan berupa pengeluaran pemerintah, *transfer payments*, dan *money supply* (untuk menggambarkan kebijakan fiskal dan moneter), dan variabel *aggregate price level* dan pengangguran (untuk menggambarkan kondisi ekonomi makro), serta ukuran kemiskinan.

### **II.1.3. Dualisme Ekonomi dan Kemiskinan**

Adanya dikotomi antara perekonomian rural, yang dicirikan dengan masyarakat agraris dan perekonomian urban, dengan berbagai industrinya, juga menjadi penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kemiskinan di berbagai negara berkembang. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Bourguignon dan Morrison (1998), yang mendapatkan bahwa dualisme ekonomi merupakan penyebab utama adanya perbedaan distribusi pendapatan. Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian diyakini merupakan cara yang paling efisien dalam mengurangi ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan. Hal ini antara lain diketengahkan pula oleh Ravallion dan Datt (1996). Sementara itu Mellor (1999) menyebutkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur penting bagi pertumbuhan secara keseluruhan bagi suatu negara, namun pertumbuhan sektor pertanian sangat penting bagi pertumbuhan *employment* dan pengurangan kemiskinan.

Bahwa dualisme ekonomi dapat meningkatkan kemiskinan dikemukakan pula oleh Ahluwalia, Carter, dan Chenery (1979), yang menyebutkan adanya faktor-faktor institusional dan kebijakan yang bias, yang mengakibatkan aliran sumber daya berlebihan ke sektor *urban*.

Ravallion dan Chen (1997) menyebutkan perlunya memperhatikan dinamika di antara penduduk miskin, dengan melihat penduduk miskin bukan sebagai grup yang homogen, mengingat respon kemiskinan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi dan distribusi

pendapatan tentunya berbeda antara daerah *rural* dan *urban*. Hal ini juga disampaikan oleh Ali dan Thorbecke (1998), yang membuktikan bahwa *rural poverty* lebih responsif terhadap pertumbuhan ekonomi daripada *urban poverty*, namun di sisi lain *urban poverty* lebih responsif terhadap distribusi pendapatan.

#### **II.1.4. Dinamika Sektoral-Regional, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan suatu negara juga erat kaitannya dengan dinamika perekonomiannya, baik akibat perubahan struktur perekonomiannya maupun perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral dan regional. Ravallion dan Datt (1999) melakukan studi tentang pengaruh komposisi pertumbuhan ekonomi sektoral dan kondisi awal suatu daerah terhadap pengurangan tingkat kemiskinannya. Demikian pula dengan Bigsten dan Levin (2000), yang menyebutkan pentingnya memperhatikan dinamika intersektoral dalam menyusun strategi untuk mengurangi kemiskinan.

Hal ini juga diamati oleh Hoeven (2004), yang melihat adanya keterkaitan antara perubahan struktur ekonomi di suatu negara dan ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan yang diakibatkannya. Sementara itu Huppi dan Ravallion (1990), yang meneliti tentang struktur kemiskinan sektoral pada periode *adjustment* di Indonesia pada pertengahan tahun 1980-an, mendapatkan bahwa meskipun secara keseluruhan tingkat kemiskinan mengalami penurunan, namun pengaruhnya tidak merata pada lintas regional dan sektoral, di mana pengurangan kemiskinan yang signifikan terutama terjadi pada sektor *rural farming*.

Datt dan Ravallion (2002) dalam penelitiannya menekankan adanya perbedaan tingkat kemiskinan di antara beberapa daerah di India. Daerah-daerah yang pembangunan daerah pertanian dan *human capital*-nya rendah relatif tidak responsif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan. Sementara itu Friedman (2002), yang melakukan studi tentang respon *poverty* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mendapatkan adanya respon yang tinggi. Namun perbedaan antar daerah dalam tingkat kemiskinan tetap ada meskipun telah dilakukan langkah-langkah untuk mengontrol tingkat pendapatan pada tingkat provinsi. Terlihat bahwa faktor-faktor lokal memainkan peranan penting terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah.

#### **II.1.5. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan**

Ahluwalia, Carter, dan Chenery (1979) menyebutkan ada beberapa alternatif kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, yakni: akselerasi pertumbuhan ekonomi, memperbaiki distribusi pendapatan, dan mengurangi pertumbuhan penduduk. Sementara itu Bigsten dan Levin (2000)

menyebutkan bahwa beberapa elemen strategis yang dapat mengurangi kemiskinan antara lain: *outward-oriented strategy* berupa pertumbuhan ekonomi yang dimotori ekspor, yang didasarkan pada manufaktur yang *labor intensive*, pembangunan pertanian dan daerah pedesaan, dengan menggalakkan teknologi baru, investasi pada infrastruktur fisik dan *human capital*, institusi yang efisien yang memberikan insentif kepada petani dan entrepreneur, kebijakan sosial untuk mempromosikan kesehatan, pendidikan, *social capital*, dan jaring pengaman untuk memproteksi penduduk miskin.

Sementara itu hasil studi de Janvry dan Sadoulet (1999) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan secara efektif hanya jika tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan awal tidak terlalu tinggi dan tingkat pendidikan masyarakatnya cukup tinggi. Ditemukan pula adanya asimetri atas dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, yakni dampak penurunan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan akan lebih besar daripada dampaknya.

### **II.1.6. Pertumbuhan Ekonomi yang Mendorong Pengentasan Kemiskinan**

Dari uraian di muka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya dapat mengentaskan kemiskinan, seringkali terjadi *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Ahluwalia (1976) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi memang disertai dengan meningkatnya *inequality*, namun di sisi lain pendapatan penduduk miskin juga meningkat meskipun dengan *rate* yang lebih lambat dari rata-rata peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, jadi pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan awal. Jika pengentasan kemiskinan diprioritaskan, yang akan terjadi adalah bahwa pertumbuhan ekonomi akan relatif rendah.

Dalam hal ini perlu diambil kebijakan guna mengarahkan pertumbuhan ekonomi agar pertumbuhan tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, atau sering disebut *pro-poor growth*. Bigsten dan Levin (2000) menyebutkan bahwa strategi *pro-poor growth* tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus dikombinasikan dengan kebijakan distribusi pendapatan. Namun terdapat *trade-off*. Jika pengurangan kemiskinan dapat dicapai melalui perbaikan distribusi pendapatan, maka kebijakan distribusi pendapatan diprioritaskan. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan dapat dicapai melalui ketidakmerataan distribusi pendapatan yang lebih besar maka terdapat toleransi atas distribusi pendapatan tersebut.

Osmani (2004) menyebutkan bahwa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan harus mengedepankan baik tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi maupun tingginya

elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Studinya menekankan peran pengangguran dalam menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, mengingat masyarakat miskin banyak bersandar pada tenaga kerjanya. Di samping itu *return to labor* juga sangat ditentukan oleh *physical assets*, *human capital*, dan *social capital*, yang jika faktor-faktor tersebut rendah maka seorang pekerja dapat terjebak dalam kemiskinan. Di samping itu peran *factor productivity* juga penting untuk menggerakkan pertumbuhan dalam upaya pengentasan kemiskinan, sebagaimana dikemukakan oleh Treichel (2005).

## II.2. Kerangka Konseptual

Saat ini berbagai upaya tengah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dikatakan tidak berkualitas sehingga tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Namun terlihat adanya upaya analisis yang kurang terarah, di mana pertumbuhan ekonomi selalu didekomposisi dari sisi pengeluaran, yakni berapa besarkah pertumbuhan konsumsi, investasi, pengeluaran Pemerintah, dan ekspor-impor. Sementara itu kemiskinan selalu dilihat dalam konteks regional, pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Beberapa institusi pun mulai membangun model makronya dengan memasukkan kemiskinan sebagai variabelnya tanpa mendekomposisi terlebih dahulu besaran kemiskinan tersebut.

Melalui pendekatan sektoral pada penelitian ini, di mana pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan didekomposisi berdasarkan sisi sektoralnya, diharapkan dapat diperoleh jawaban atas fenomena besarnya tingkat kemiskinan Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.

Sebagaimana diuraikan di muka, terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, yang antara lain dapat dilihat dari besarnya *growth elasticity of poverty reduction*-nya (elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi), yakni seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Demikian pula halnya dengan perubahan struktur perekonomian, yang menyebabkan terjadinya perubahan pendapatan para pelaku ekonomi, disinyalir juga turut berdampak pada tingkat kemiskinan.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang memodelkan dan menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, studi ini memperhitungkan pula dampak perubahan struktur perekonomian. Adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar sektor usaha menyebabkan terjadinya perubahan struktur perekonomian, yang antara lain dipicu oleh adanya perbedaan insentif dari tiap sektor usaha. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur, dan kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut:



### II.2.1. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan pertumbuhan GDP, menunjukkan naiknya jumlah output yang diproduksi oleh suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga mencerminkan naiknya pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di perekonomian tersebut. Dengan mendekomposisi pertumbuhan ekonomi tersebut per sektor usaha, dapat diketahui adanya perbedaan yang cukup signifikan atas pertumbuhan ekonomi tiap sektor usaha tersebut, yang tentunya berimplikasi pada berbagai variabel sektoral lainnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu sektor usaha sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan *employment* dan tingkat produktivitas sektor usaha yang bersangkutan, di samping tentunya dipengaruhi pula oleh *business cycle* sektor yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi sektoral tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_i = K_i^\alpha L_i^{1-\alpha} \cdot TFP_i$$

di mana  $Y$  adalah output,  $K$  = kapital,  $L$  = *labor* (tenaga kerja) dan  $TFP$  = *total factor productivity*

Sementara itu perubahan struktur ekonomi juga turut berpengaruh terhadap kinerja sektor-sektor usaha tersebut, dan dengan demikian mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi sektoral. Di sisi lain perubahan struktur juga disebabkan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar sektor usaha. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur, serta *employment* dan produktivitas sektoral.

### II.2.2. Perubahan Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Indonesia, yang terdiri dari sembilan sektor usaha, senantiasa berubah. Dinamika perubahan struktur tersebut merupakan hal yang wajar dalam suatu perekonomian. Perubahan struktur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan insentif (yakni *rate of return on investment*), yang senantiasa berubah seiring dengan perkembangan *demand* dan *supply* di masing-masing sektor usaha; perkembangan teknologi; dan ketersediaan sumber daya atau faktor produksi bagi perkembangan suatu sektor usaha.

Perubahan struktur perekonomian tersebut juga terjadi seiring dengan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar sektor usaha. Sektor usaha yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi akan semakin besar *share* atau porsinya dalam perekonomian, sebaliknya yang tingkat pertumbuhannya rendah akan menurun *share*-nya. Perubahan struktur ini tentunya akan mengubah distribusi pendapatan sektoral dari para pelaku ekonomi. Sektor pertanian, yang menurun *share*-nya pada beberapa tahun terakhir, misalnya, akan menjadi kurang menarik dibandingkan dengan sektor-sektor usaha yang pertumbuhannya tinggi dan *share*-nya makin besar. Pendapatan atas faktor produksi akan semakin tertuju pada sektor-sektor usaha yang tengah berkembang dan semakin sedikit yang bisa dinikmati oleh pelaku usaha di sektor pertanian.

Perubahan struktur ekonomi yang mengakibatkan perubahan distribusi pendapatan sektoral tersebut akan mengakibatkan terjadinya pergeseran daya beli dari pemilik faktor produksi yang sektor usahanya mengecil perannya ke pemilik faktor produksi yang tengah berkembang. Hal ini dapat memicu timbulnya kemiskinan jika pergeseran tersebut terjadi dari sektor usaha yang sebelumnya dikategorikan berpendapatan rendah (seperti sektor pertanian) ke sektor usaha yang berpendapatan tinggi. Sebagaimana diketahui sektor pertanian merupakan sektor usaha dengan tingkat pendapatan terendah.

### II.2.3. Kemiskinan

Sebelum melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia, perlu ditetapkan terlebih dahulu ukuran kemiskinan yang akan digunakan. Ukuran kemiskinan tersebut tergantung pada beberapa faktor, yakni:

- Standar hidup, yang dalam hal ini bisa menggunakan pendapatan atau pengeluaran untuk konsumsi pada periode waktu tertentu.
- *Poverty line* di mana individu dikategorikan miskin.

Sebagaimana disebutkan Ray (1998), terdapat beberapa ukuran kemiskinan. Ukuran kemiskinan yang digunakan pada penelitian ini adalah *Headcount Ratio* (HCR) dan *Income*

*Gap Ratio* (IGR). HCR dalam hal ini digunakan berkaitan dengan fenomena meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HCR = \frac{HC}{n}$$

di mana *HC* adalah *headcount* atau jumlah penduduk miskin dan *n* adalah jumlah penduduk.

Melalui HCR tersebut dapat diketahui besarnya persentase penduduk miskin di tiap sektor usaha.

Sementara itu melalui IGR dapat diketahui intensitas dari kemiskinan pada suatu sektor usaha. Meskipun ukuran ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, namun dapat digunakan sebagai acuan seberapa jauh tingkat kemiskinan dibandingkan garis kemiskinannya. Ukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IGR = \frac{\sum_{y_i < p} (p - y_i)}{pHC}$$

di mana  $y_i$  adalah pendapatan penduduk miskin,  $p$  adalah *poverty line*.

Terdapat pula beberapa ukuran kemiskinan lain yang lazim dipakai, sebagaimana diketengahkan oleh Foster, Greer, dan Thorbecke (1984), yang bentuk umumnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$P = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q [(Z_p - Y_i)/Z_p]^\alpha$$

di mana  $N$  adalah jumlah penduduk,  $q$  adalah penduduk miskin,  $Z_p$  adalah *poverty line*,  $Y_i$  adalah pendapatan penduduk miskin dan  $\alpha$  adalah bobot.

Semakin besar  $\alpha$ , semakin besar pula bobot yang diberikan kepada penduduk yang lebih miskin. Pada  $\alpha = 0$ , ukuran yang dihasilkan berupa  $P_0$ , yang merupakan HCR. Sementara itu pada  $\alpha = 1$ , dihasilkan indeks kemiskinan  $P_1$ , yang pada dasarnya merupakan perkalian antara HCR dan IGR. Sedangkan jika  $\alpha = 2$ , dihasilkan indeks kemiskinan  $P_2$ , yang dapat menunjukkan tingkat ketidakmerataan di antara penduduk miskin.

Dalam hal ini yang akan digunakan adalah ukuran kemiskinan HCR dan IGR. Ukuran kemiskinan HCR digunakan untuk melihat gambaran besarnya kemiskinan di tiap sektor, dan IGR untuk melihat intensitasnya. Ukuran kemiskinan  $P_1$  dan  $P_2$  tidak digunakan mengingat besarnya merupakan suatu komposit (antara HCR dan IGR). Tentunya akan lebih baik untuk menganalisis masing-masing komponennya.

Dalam hal ini dilakukan dekomposisi atas besaran kemiskinan di Indonesia, berupa kemiskinan sektoral-regional dan kemiskinan regional-sektoral. Melalui dekomposisi ini diharapkan dapat diperoleh pemetaan kemiskinan baik pada tiap sektor usaha maupun pada tiap daerah.

#### II.2.4. Model

Melalui dekomposisi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan saja belum dapat diketahui hubungan di antara keduanya. Dalam hal ini perlu dibangun model untuk menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur, dan kemiskinan di Indonesia, yakni dari sisi sektoralnya. Pada penelitian ini tidak dibangun model untuk menguji hubungan antara kemiskinan sektoral-regional dan pertumbuhan ekonominya, mengingat tidak tersedianya data pertumbuhan ekonomi sektoral-regional.

##### 1) Headcount Ratio (HCR)

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur, dan kemiskinan sektoral di Indonesia, yang dalam hal ini diukur dengan HCR, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HCR_i = \vartheta + \eta \hat{y}_i + \nu S_i \quad i = 1, 2, \dots, n : \text{sektor usaha}$$

di mana  $\hat{y}$  adalah pertumbuhan GDP riil dan  $S$  adalah *share* GDP riil

Diperkirakan terdapat perbedaan sektoral yang cukup berarti atas besaran HCR sektoral, mengingat masing-masing sektor usaha mempunyai karakteristik berbeda-beda, antara lain dari sisi *labor* dan *capital intensity*-nya, kelompok penghasilan karyawannya, dan struktur industri intra-sektoral terkait dengan *backward* dan *forward linkage*-nya. Perbedaan karakteristik tersebut tentunya akan berdampak pada perbedaan respon, terlebih lagi situasi yang dihadapi oleh masing-masing sektor usaha tersebut berbeda-beda, di mana ada sektor usaha yang berkembang dan tingkat pertumbuhannya tinggi, sementara sektor usaha lainnya justru menyusut *share*-nya.

##### 2) Income Gap Ratio (IGR)

Model untuk menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur terhadap IGR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IGR_i = \alpha + \gamma \hat{y}_i + \lambda S_i \quad i = 1, 2, \dots, n : \text{sektor usaha}$$

di mana  $\hat{y}$  adalah pertumbuhan GDP riil dan  $S$  adalah *share* GDP riil.

Dari formulasi tersebut di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui beberapa jalur, yakni:

- a. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan per kapita sektoral, baik pendapatan dari tenaga kerja maupun kapital, dan besarnya konsumsi per kapita. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu sektor pada umumnya diikuti dengan tingginya konsumsi per kapita.
- b. Perubahan struktur perekonomian secara langsung akan berdampak pada adanya perubahan distribusi pendapatan sektoral yang diterima oleh para pemilik faktor produksi, baik dari tenaga kerja maupun kapital. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap besarnya konsumsi per kapita dan tingkat kemiskinan di sektor yang bersangkutan.
- c. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi, mengingat adanya perbedaan insentif seiring dengan adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar sektor usaha, yang pada akhirnya akan berdampak pula pada tingkat kemiskinan.

### III. METODOLOGI

#### III.1. Data

Penelitian ini menggunakan data Susenas dari BPS dan atas beberapa variabel datanya diperoleh dari Bank Indonesia, CEIC, dan dari berbagai publikasi lainnya. Periode observasi dari tahun 1994 - 2006, dengan menggunakan data tahunan. Beberapa variabel yang digunakan antara lain: tingkat kemiskinan sektoral, pertumbuhan ekonomi sektoral dan *share* GDP riil sektoral.

Tingkat kemiskinan sektoral diperoleh melalui pengolahan data sendiri, dengan menggunakan *poverty line* regional sepanjang periode observasi. Atas beberapa periode yang BPS tidak mempublikasikan besaran *poverty line* regional tersebut, yakni tahun 1994, 1995, 1997, dan 1998 dilakukan interpolasi untuk mendapatkan besaran *poverty line* regional. Sementara itu untuk tahun 2005 dan 2006 dilakukan ekstrapolasi untuk mendapatkan *poverty line* regional berdasarkan *poverty line* nasional

Dalam hal ini terdapat dua jenis HCR dan IGR yang dihitung, yakni HCR dan IGR sektoral, yang menunjukkan tingkat kemiskinan dalam ruang lingkup sektor yang bersangkutan, serta HCR yang dibobot dengan *employment share* masing-masing sektor usaha terhadap total *employment* pada perekonomian Indonesia (selanjutnya disebut HCR tertimbang) dan IGR yang dibobot dengan porsi penduduk miskin di suatu sektor terhadap penduduk miskin Indonesia (selanjutnya disebut IGR tertimbang).

Dalam menghitung besaran HCR dan IGR tersebut, dilakukan aproksimasi sepenuhnya berdasarkan *sample*, tanpa menggunakan bobot rumah tangga dan bobot individu yang ada pada data Susenas. Jadi *employment share* masing-masing sektor usaha tergantung pada jumlah *sample* yang sumber penghasilannya berasal dari sektor usaha tersebut. Demikian pula halnya dengan porsi penduduk yang dikategorikan miskin. Tidak digunakannya bobot yang ada pada data Susenas didasarkan pada pertimbangan bahwa bobot tersebut tidak mencerminkan bobot sektoral, tapi lebih pada bobot representasi penduduk pada suatu wilayah *sampling*, dengan demikian tidak tepat untuk digunakan dalam melakukan pembobotan sektoral.

### III.2. Metode

Metode yang digunakan untuk mengestimasi model HCR dan IGR adalah dengan *panel data*. Dalam hal ini di samping dilakukan regresi dengan *common coefficient*, dilakukan pula regresi *cross-section specific coefficient* guna mendapatkan gambaran atas perbedaan respon sektoral kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Mengingat data berupa 13 periode observasi dengan 9 *cross-section*, sementara itu terdapat 9 x 2 *cross-section specific coefficient*, diperlukan kehati-hatian dalam membaca hasil regresi dengan *cross-section specific coefficient* tersebut. Sementara itu pengujian dengan *F-test* dan *Hausman test* akan dilakukan guna melihat metode *panel data* mana yang paling tepat, apakah *pooled least square*, *fixed effect model*, ataukah *random effect model*.

Dalam menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur, dan kemiskinan di Indonesia, dilakukan regresi atas beberapa model sebagai berikut:

#### 1) Regresi Headcount Ratio (HCR)

Langkah pertama adalah melakukan regresi kemiskinan sektoral yang diukur dengan *Headcount Ratio* (HCR) terhadap pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Melalui langkah ini diharapkan dapat diketahui gambaran umum dari pengaruh keduanya terhadap besarnya tingkat kemiskinan, termasuk perbedaan respon HCR sektoralnya.

$$HCR_{i,t} = \vartheta_i + \eta \hat{y}_{i,t} + \nu S_{i,t} + e_{i,t}$$

di mana  $\hat{y}$  adalah pertumbuhan GDP riil dan  $S$  adalah *share* GDP riil. Dalam hal ini dilakukan regresi terhadap besaran HCR dalam ruang lingkup sektor usaha yang bersangkutan (HCR sektoral) guna melihat pengaruh pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi di masing-masing sektor usaha.

Dilakukan pula regresi terhadap HCR yang dibobot dengan *employment share* sektoral terhadap keseluruhan *sample* (HCR tertimbang), yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HCR_i = \frac{HC_i}{n_i} \cdot \frac{n_i}{N} = \frac{HC_i}{N}$$

di mana  $HC_i$  adalah *headcount* atau jumlah penduduk miskin di sektor ke- $i$ ,  $n_i$  adalah jumlah penduduk di sektor  $i$ ,  $N$  adalah jumlah penduduk Indonesia,  $\frac{n_i}{N}$  adalah *employment share* sektor  $i$ .

Dengan pendekatan ini dapat terlihat besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur terhadap kemiskinan di suatu sektor sekaligus dampaknya bagi kemiskinan di tingkat nasional.

## 2) Regresi Income Gap Ratio (IGR)

Melalui regresi IGR terhadap pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dapat diketahui pengaruh keduanya terhadap intensitas kemiskinan di Indonesia, termasuk pada tingkat sektoralnya.

$$IGR_{i,t} = \alpha_i + \gamma \hat{y}_{i,t} + \lambda S_{i,t} + e_{i,t}$$

di mana  $\hat{y}$  adalah pertumbuhan GDP riil dan  $S$  adalah *share* GDP riil.

Seperti halnya pada model sebelumnya, regresi juga dilakukan terhadap besaran IGR dalam ruang lingkup masing-masing sektor (IGR sektoral) guna melihat pengaruh sektoralnya, dan regresi terhadap IGR yang dibobot dengan porsi penduduk miskin di suatu sektor usaha terhadap penduduk miskin Indonesia (IGR tertimbang) untuk melihat dampaknya terhadap kemiskinan pada sektor tersebut sekaligus terhadap kemiskinan di tingkat nasional. IGR tertimbang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IGR_i = \frac{\sum_{y_i < p} (p - y_i)}{p HC_i} \cdot \frac{p HC_i}{p HC}$$

di mana  $\hat{y}_i$  adalah pendapatan penduduk miskin,  $p$  adalah *poverty line*,  $HC_i$  adalah *headcount*, jumlah penduduk miskin di sektor  $i$ ,  $HC$  adalah *headcount* atau jumlah penduduk miskin Indonesia, dan  $\frac{p HC_i}{p HC}$  adalah : porsi penduduk miskin di suatu sektor usaha terhadap penduduk miskin Indonesia (dengan mengeluarkan *poverty line* pada rumusan tersebut).

## IV. ANALISIS

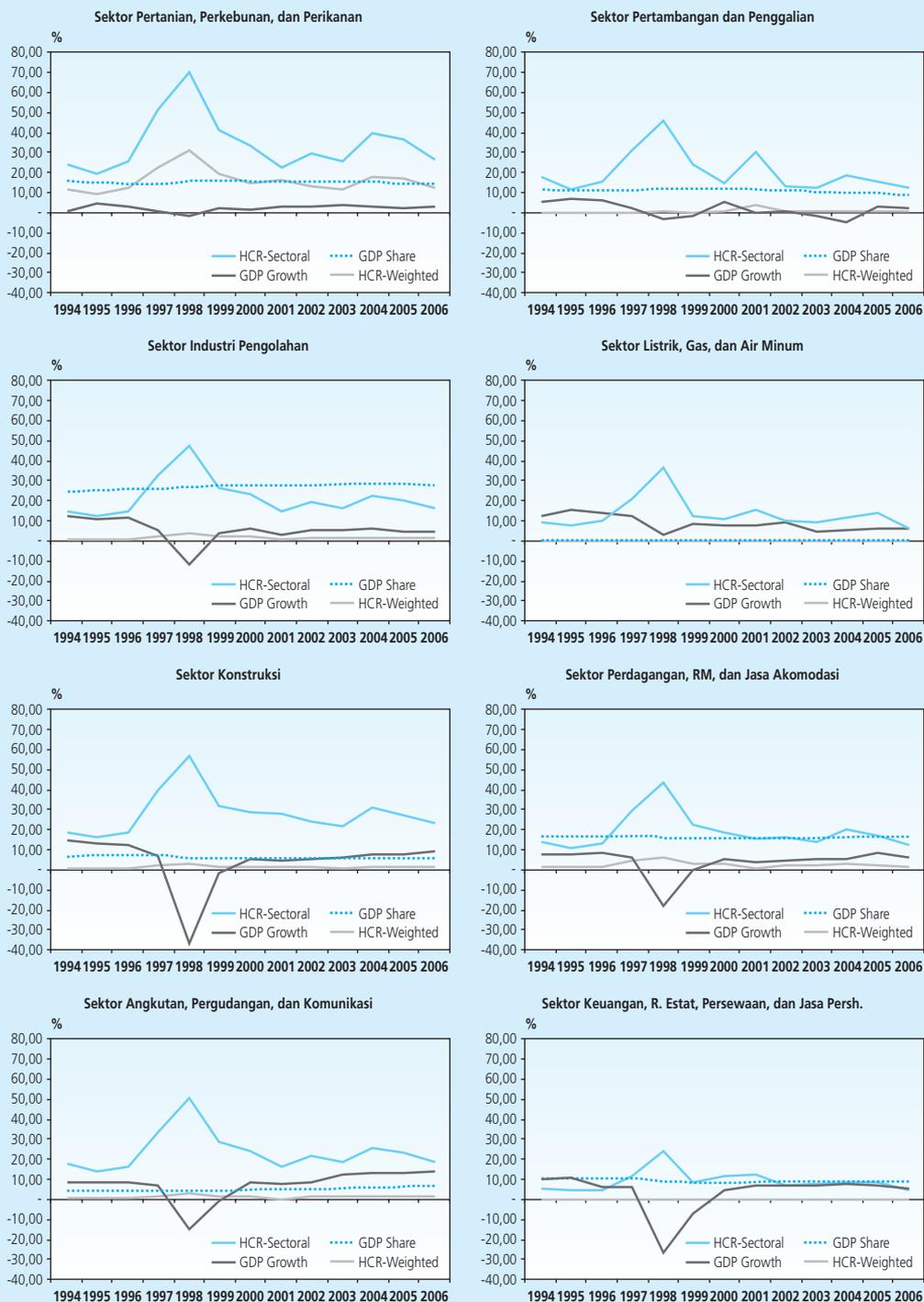
### IV.1. Gambaran Variabel dan Perkembangannya

Pada tingkat agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada beberapa tahun terakhir relatif tinggi, yakni berkisar 5% - 6% per tahun. Namun dinamika tingkat kemiskinan di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa periode di mana pertumbuhan ekonomi diwarnai dengan peningkatan kemiskinan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa perekonomian tumbuh cukup tinggi namun yang terjadi justru semakin naiknya angka kemiskinan. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2006 terdapat sekitar 17,75% penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin.

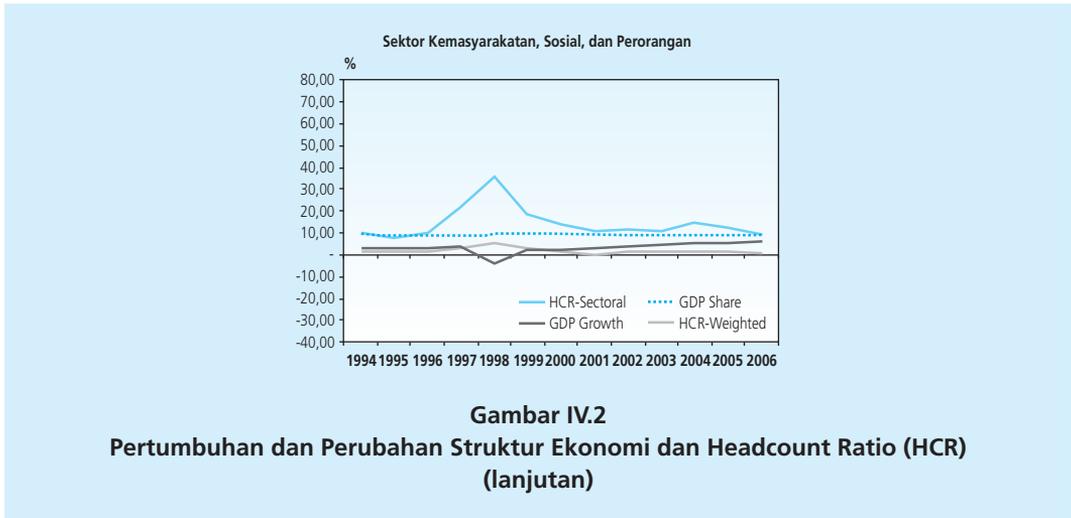
Tingkat kemiskinan di suatu sektor usaha dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi kemiskinan yang terjadi hanya dalam ruang lingkup sektor usaha yang bersangkutan (dalam hal ini diukur dengan HCR dan IGR sektoral) dan dari sisi kemiskinan di sektor usaha yang bersangkutan secara relatif terhadap kemiskinan di tingkat nasional (yang diukur dengan HCR dan IGR tertimbang).

Untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang tingkat kemiskinan di Indonesia dilakukan penghitungan tingkat kemiskinan, baik dari sisi sektoral maupun sisi regional. Hasil perhitungan lengkap atas tingkat kemiskinan sektoral-regional Indonesia pada tahun 2006 dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4, yang menunjukkan baik besaran HCR dan IGR sektoral maupun HCR dan IGR tertimbang. Hasil perhitungan tingkat kemiskinan sektoral-regional tersebut menunjukkan bahwa hampir di semua daerah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar bagi tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara itu sektor listrik, gas, dan air minum serta sektor keuangan, real estat, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan dua sektor usaha yang tingkat kemiskinannya paling kecil hampir di semua daerah. Perbedaan tingkat kemiskinan sektoral di daerah-daerah tersebut terkait pula dengan *factor endowment* dan adanya sektor-sektor usaha tertentu yang memang tidak cukup berkembang dibandingkan sektor-sektor usaha lainnya yang menjadi unggulan di daerah-daerah tersebut.

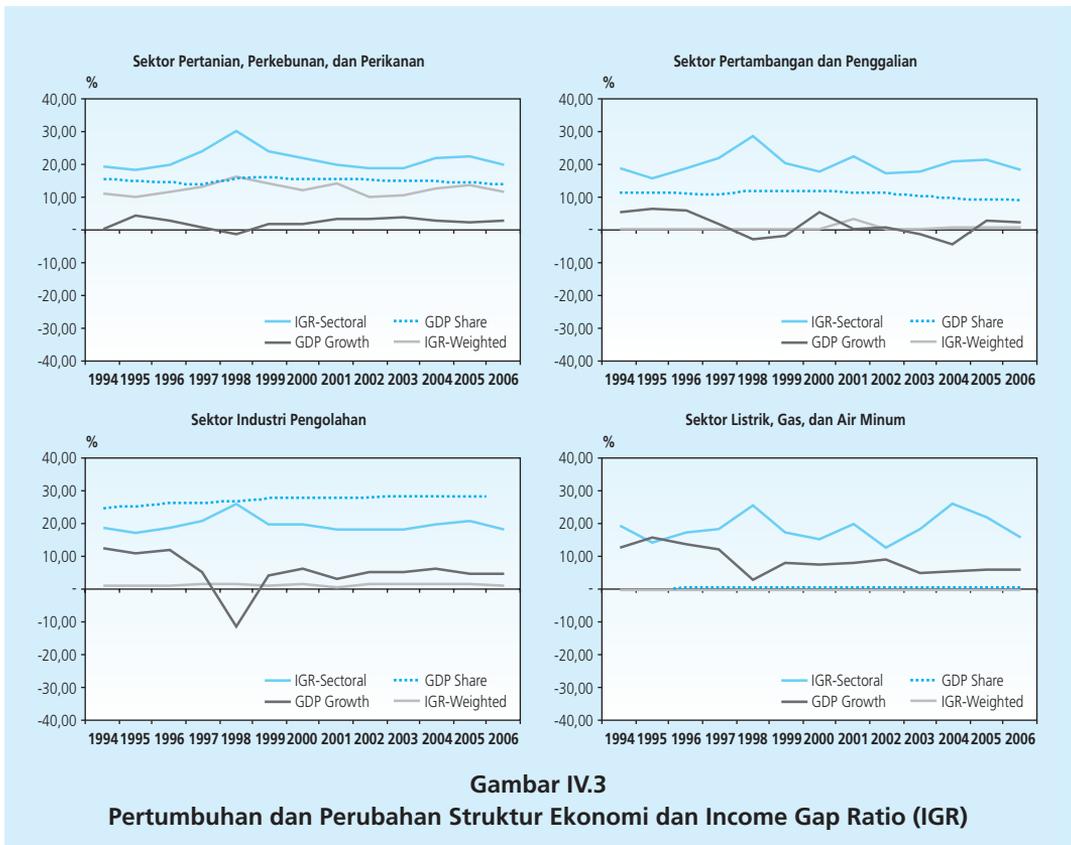
Besaran HCR, baik sektoral maupun tertimbang, dan variabel pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi di masing-masing sektor usaha sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

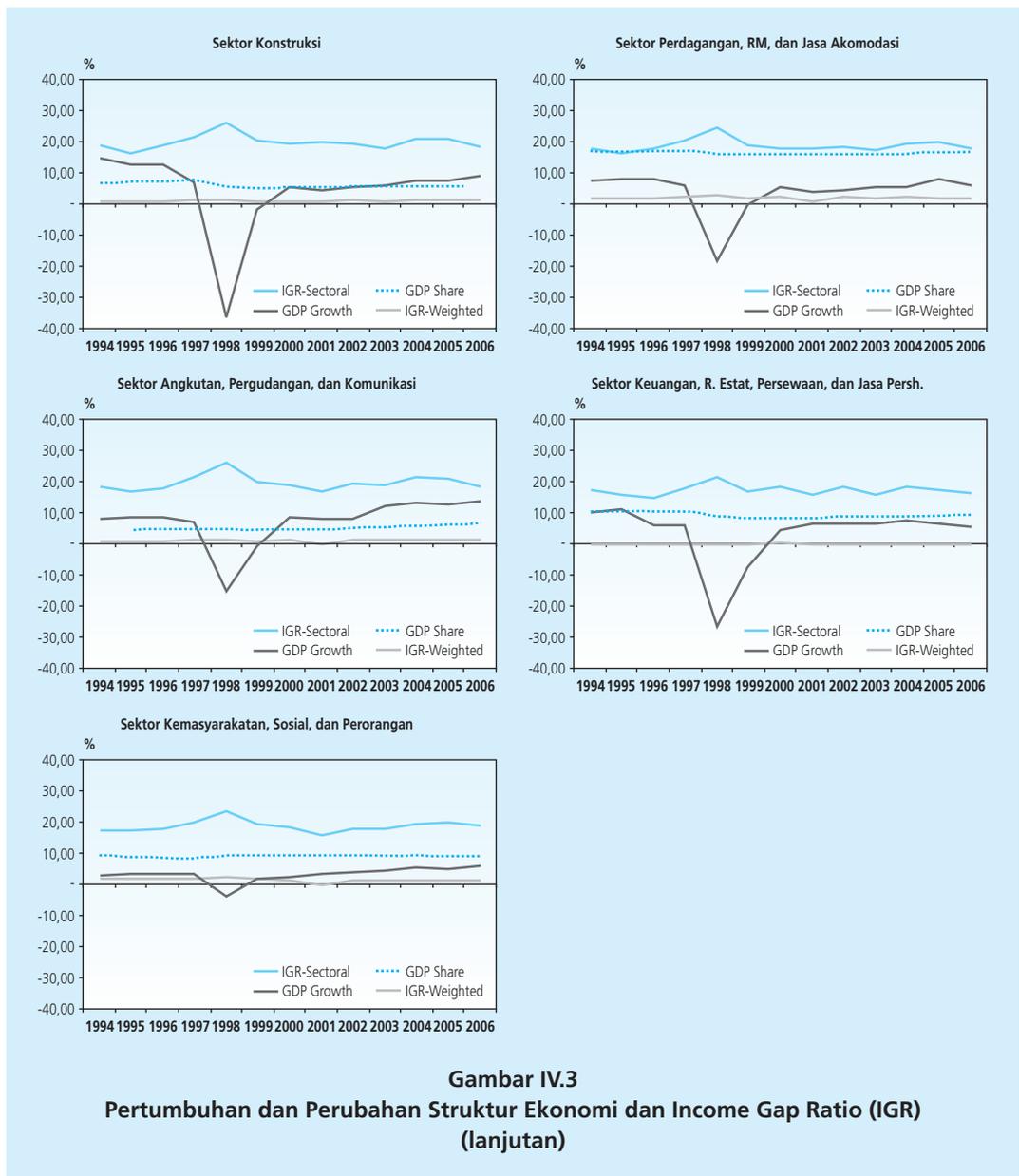


**Gambar IV.2**  
**Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi dan Headcount Ratio (HCR)**



Sementara itu besaran IGR dan variabel pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi di masing-masing sektor usaha sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.





Dari kedua gambar di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan yang terjadi dalam ruang lingkup sektor usaha yang bersangkutan (dalam hal ini diukur dengan HCR dan IGR sektoral) pada umumnya relatif tinggi, namun jika dibobot dengan masing-masing sektor usaha (diukur dengan HCR dan IGR tertimbang) terlihat bahwa kemiskinan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan adalah yang paling tinggi.

## IV.2. Hasil Regresi

### IV.2.1. Headcount Ratio (HCR)

Hasil regresi terlebih dahulu diuji dengan *F-test* dan *Hausman test*. Berdasarkan pengujian dengan *F-test*, guna menentukan model terbaik di antara *pooled LS* dan *fixed effect*, terlihat bahwa nilai *F-statistik*nya 4,01, sementara itu *F-tabel* dengan  $v_1=8$  dan  $v_2=106$  pada *level of significance* 5% adalah 2,02. Dengan demikian *fixed effect model* lebih dipilih daripada *pooled LS*. Sementara itu hasil pengujian dengan *Hausman test* menghasilkan besaran *Chi-square* 2,17 dengan *p-value* sebesar 0,3381, dengan demikian tidak signifikan untuk menolak  $H_0$  bahwa *random effect* dan *fixed effect* sama saja. Mengingat adanya kemungkinan korelasi antara *unobserved/time-constant factors* dan *explanatory variables*, dalam hal ini dipilih untuk menggunakan *fixed effect model*.

Nilai *adjusted R-squared*-nya yang sebesar 0,69 menunjukkan bahwa model tersebut dapat menjelaskan variasi pada *Headcount Ratio* (HCR) sektoral dengan baik. Hal ini didukung pula dengan nilai *F-statistik* sebesar 22,65 yang menunjukkan signifikansi model tersebut. *DW-statistik* yang sebesar 1,86 juga menunjukkan model tersebut terhindar dari permasalahan autokorelasi. Hasil regresinya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel IV.1.

Untuk melihat lebih jauh pengaruh kedua variabel tersebut pada masing-masing sektor usaha, dilakukan regresi dengan *cross-section specific coefficient*. Sebagaimana disebutkan di muka, mengingat data berupa 13 periode observasi dengan 9 *cross-section*, sementara itu terdapat  $9 \times 2$  *cross-section specific coefficient*, diperlukan kehati-hatian dalam membaca hasil regresi dengan *cross-section specific coefficient* tersebut.

**Tabel IV.1**  
**Headcount Ratio (HCR) Sektoral**

Dependent Variable: Headcount Ratio Sektoral Periode observasi: 1994 - 2006 Metode: Fixed Effect		
Sektor Usaha	Explanatory Variables	
	Pertumbuhan GDP Riil Sektoral (GDPG)	Share GDP Riil Sektoral (GDPSH)
Model I: Common Coefficient		
Sektor sektor Usaha	0,817930*** (0,090332)	2,869699** (1,293554)
Adjusted R <sup>2</sup>	0,689952	
F statistic	22,64619***	
DW statistic	1,860429	

**Tabel IV.1**  
**Headcount Ratio (HCR) Sektoral (lanjutan)**

Dependent Variable: Headcount Ratio Sektoral Periode observasi: 1994 - 2006 Metode: Fixed Effect		
Sektor Usaha	Explanatory Variables	
	Pertumbuhan GDP Riil Sektoral (GDPG)	Share GDP Riil Sektoral (GDPSH)
Model II: Cross Section Specific Coefficient		
Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	7,434179*** (1,781110)	2,401243 (4,083430)
Pertambangan dan Penggalian	1,449816** (0,640206)	5,104057** (2,262080)
Industri Pengolahan	1,513295*** (0,273061)	2,057956 (1,290441)
Listrik, Gas, dan Air Minum	2,552827*** (0,769414)	78,73699*** (27,77054)
Konstruksi	0,776255*** (0,130693)	1,892599 (2,090330)
Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	1,217331*** (0,218822)	4,326644 (3,700063)
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	1,276073*** (0,237790)	4,738775* (2,482614)
Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	0,425913*** (0,103392)	0,326761 (1,120798)
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	2,619340*** (0,598427)	2,840730 (4,894959)
Adjusted R <sup>2</sup>	0,775040	
F statistic	16,37107***	
DW statistic	1,885689	

Standard Error dalam tanda ( );  
 Signifikan pada  $\alpha = 1\%$ ,  $5\%$ , dan  $10\%$  ditunjukkan dengan \*\*\*, \*\* dan \*

Hasil regresi di atas menunjukkan besarnya pengaruh pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dalam ruang lingkup sektor usaha yang bersangkutan. Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sektor listrik, gas, dan air minum, serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan berpengaruh besar terhadap kemiskinan di sektor-sektor usaha tersebut. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan mengurangi kemiskinan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebesar 7,43%. Sementara itu pengaruh perubahan struktur ekonomi terlihat bervariasi antar sektor usaha.

Sementara itu regresi juga dilakukan terhadap variabel HCR tertimbang. Pengujian statistik dalam pemilihan model terbaik, antara *pooled LS*, *fixed effect*, dan *random effect*, dilakukan dengan cara sebagaimana disebutkan di atas. Hasilnya menunjukkan model terbaik dengan *fixed effect model*. Hasil regresinya sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 Headcount Ratio (HCR) Tertimbang		
Dependent Variable: Headcount Ratio Tertimbang Periode observasi: 1994 - 2006 Metode: Fixed Effect		
Sektor Usaha	Explanatory Variables	
	Pertumbuhan GDP Riil Sektoral (GDPG)	Share GDP Riil Sektoral (GDPSH)
Model I: Common Coefficient		
Sektor sektor Usaha	0,039814*** (0,008042)	0,124702 (0,122777)
Adjusted R <sup>2</sup>	0,806383	
F statistic	41,51251***	
DW statistic	2,009136	
Model II: Cross Section Specific Coefficient		
Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	2,973951*** (0,775650)	0,354969 (1,778280)
Pertambangan dan Penggalian	0,066881 (0,081404)	0,048534 (0,287631)
Industri Pengolahan	0,107051*** (0,022886)	0,056805 (0,108154)
Listrik, Gas, dan Air Minum	0,007945*** (0,002966)	0,314434*** (0,107044)
Konstruksi	0,44458*** (0,008133)	0,168086 (0,130073)
Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	0,189097*** (0,043031)	0,737242 (0,727615)
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	0,077634*** (0,023081)	0,461373* (0,240976)
Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	0,003195*** (0,001236)	0,013436 (0,013399)
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	0,462220*** (0,111297)	1,013462 (0,910381)
Adjusted R <sup>2</sup>	0,892955	
F statistic	38,21766***	
DW statistic	2,125882	
Standard Error dalam tanda ( ); Signifikan pada $\alpha = 1\%$ , $5\%$ , dan $10\%$ ditunjukkan dengan ***, ** dan *		

Dari hasil regresi tersebut terlihat bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sangat tinggi, yakni mencapai -2,97. Hal ini berarti tiap pertumbuhan sebesar 1% di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan akan dapat mengurangi kemiskinan nasional sebesar 2,97%. Jadi dalam hal ini besaran koefisiennya menunjukkan pengaruhnya terhadap kemiskinan nasional, mengingat tingkat kemiskinan (dalam hal ini HCR) sudah dibobot dengan *employment share*-nya.

Sementara itu elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan hanya sebesar -0,11. Dengan demikian tiap pertumbuhan sebesar 1% di sektor usaha tersebut akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan nasional hanya sebesar 0,11%. Sektor usaha yang elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonominya paling kecil adalah sektor keuangan, real estat, persewaan, dan jasa perusahaan, yakni hanya sebesar -0,003. Sedangkan sektor usaha yang elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonominya cukup besar antara lain sektor konstruksi (-0,44) dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (-0,46). Besaran koefisien variabel pertumbuhan GDP riil sektoral (GDPG) sebagian besar terlihat signifikan, bahkan pada *level of significance* 1%.

Sementara itu koefisien variabel *share* GDP riil sektoral sebagian besar tidak signifikan. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi *share* GDP riil sektoralnya, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Hal ini tentunya sejalan dengan logika, dengan semakin besarnya output dan pendapatan suatu sektor usaha tentunya akan semakin banyak pula yang dapat dibagikan kepada para pelaku ekonomi di sektor usaha tersebut. Beberapa sektor usaha yang koefisien variabel *share* GDP riil sektoralnya bertanda negatif antara lain sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.

Meskipun koefisiennya sama-sama bertanda negatif, dalam hal ini perlu dicermati bahwa arah perubahan *share* GDP riil kedua sektor usaha tersebut berbeda. *Share* sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan mengalami penurunan, sedangkan *share* sektor industri pengolahan mengalami peningkatan. Naiknya *share* sektor industri pengolahan dalam hal ini dapat mengurangi kemiskinan di tingkat nasional. Sedangkan turunnya *share* sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan nasional.

Dari hasil pengolahan data dan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan tidak saja merupakan sektor usaha yang paling tinggi tingkat kemiskinannya, tapi juga mempunyai elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Di samping itu penurunan *share* sektor usaha tersebut juga turut memperburuk tingkat kemiskinan Indonesia. Dengan demikian langkah yang paling tepat untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan perhatian lebih pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

## IV.2.2. Income Gap Ratio (IGR)

Langkah pertama adalah melakukan regresi terhadap variabel IGR sektoral, untuk melihat pengaruh pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kemiskinan dalam ruang lingkup sektor usaha yang bersangkutan. Sebelumnya dilakukan pengujian statistik dalam pemilihan model terbaik, antara *pooled LS*, *fixed effect*, dan *random effect*, dengan cara sebagaimana disebutkan di atas. Hasilnya adalah model terbaik dengan *fixed effect model*. Hasil regresinya sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel IV.3 Income Gap Ratio (IGR) Sektoral		
Dependent Variable: Income Gap Ratio Sektoral Periode observasi: 1994 - 2006 Metode: Fixed Effect		
Sektor Usaha	Explanatory Variables	
	Pertumbuhan GDP Riil Sektoral (GDPG)	Share GDP Riil Sektoral (GDP SH)
Model I: Common Coefficient		
Sektor sektor Usaha	0,215601*** (0,024104)	0,613789** (0,306200)
Adjusted R <sup>2</sup>	0,516220	
F statistic	11,37954***	
DW statistic	1,912597	
Model II: Cross Section Specific Coefficient		
Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	1,754434*** (0,391601)	0,021573 (0,897797)
Pertambangan dan Penggalian	0,504689** (0,224451)	0,854578 (0,793065)
Industri Pengolahan	0,343111*** (0,065229)	0,411603 (0,308261)
Listrik, Gas, dan Air Minum	1,270040*** (0,397884)	31,89586** (14,36088)
Konstruksi	0,167095*** (0,031518)	0,400419 (0,504107)
Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	0,282799*** (0,054103)	1,431584 (0,914823)
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	0,302631*** (0,068608)	1,798927** (0,716289)
Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	0,117000*** (0,044124)	0,150770 (0,478317)
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	0,454466** (0,207114)	0,202919 (1,694132)
Adjusted R <sup>2</sup>	0,611068	
F statistic	8,009716***	
DW statistic	2,018067	
Standard Error dalam tanda ( ); Signifikan pada $\alpha = 1\%$ , $5\%$ , dan $10\%$ ditunjukkan dengan ***, ** dan *		

Dari hasil regresi tersebut terlihat bahwa sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dan sektor listrik, gas, dan air minum merupakan dua sektor usaha yang paling banyak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi di sektor usaha yang bersangkutan. Sementara itu pengaruh perubahan struktur ekonomi terlihat bervariasi, yang paling mencolok adalah pengaruhnya terhadap sektor listrik, gas, dan air minum.

Berikutnya adalah regresi terhadap variabel IGR tertimbang. Dalam hal ini juga dilakukan pengujian statistik dalam pemilihan model terbaik, antara *pooled LS*, *fixed effect*, dan *random effect*, dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, dan dipilih untuk menggunakan *fixed effect model*. Hasil regresinya sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel IV.4 Income Gap Ratio (IGR) Tertimbang		
Dependent Variable: Income Gap Ratio Tertimbang Periode observasi: 1994 - 2006 Metode: Fixed Effect		
Sektor Usaha	Explanatory Variables	
	Pertumbuhan GDP Riil Sektoral (GDPG)	Share GDP Riil Sektoral (GDP SH)
Model I: Common Coefficient		
Sektor sektor Usaha	0,007468*** (0,002490)	0,034647 (0,028833)
Adjusted R <sup>2</sup>	0,943246	
F statistic	193,7902***	
DW statistic	1,957359	
Model II: Cross Section Specific Coefficient		
Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	1,010547*** (0,227490)	0,265164 (0,489057)
Pertambangan dan Penggalian	0,035531 (0,081856)	0,049518 (0,262640)
Industri Pengolahan	0,024353** (0,010575)	0,027233 (0,049629)
Listrik, Gas, dan Air Minum	0,003295*** (0,001155)	0,185079*** (0,042043)
Konstruksi	0,008282** (0,003306)	0,031801 (0,047324)
Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	0,057254*** (0,019379)	0,418071 (0,308832)
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	0,021363 (0,015473)	0,288878* (0,156563)

**Tabel IV.4**  
**Income Gap Ratio (IGR) Tertimbang (lanjutan)**

Dependent Variable: Income Gap Ratio Tertimbang Periode observasi: 1994 - 2006 Metode: Fixed Effect		
Sektor Usaha	Explanatory Variables	
	Pertumbuhan GDP Riil Sektoral (GDPG)	Share GDP Riil Sektoral (GDPSH)
Model II: Cross Section Specific Coefficient		
Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	0,000101 (0,000740)	0,015207** (0,007590)Jasa
Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	0,171085*** (0,056885)	0,776082* (0,466309)
Adjusted R <sup>2</sup>	0,965022	
F statistic	110,3354***	
DW statistic	2,243676	
Standard Error dalam tanda ( ); Signifikan pada $\alpha = 1\%$ , $5\%$ , dan $10\%$ ditunjukkan dengan ***, ** dan *		

Hasil yang diperoleh juga terlihat serupa dengan hasil pada model HCR. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan sektor usaha yang elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonominya paling tinggi, yakni sebesar -1,01. Besaran tersebut menunjukkan bahwa tiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan dapat menurunkan IGR sebesar 1,01%. Sektor usaha lainnya yang elastisitasnya cukup tinggi dibandingkan sektor-sektor usaha lainnya adalah sektor listrik, gas, dan air minum, dengan besaran koefisien -0,17. Seperti halnya pada model HCR, sebagian besar koefisien variabel *share* GDP riil sektoral terlihat tidak signifikan, dengan pengaruh yang bervariasi antar sektor usaha.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### V.1. Kesimpulan

Dari uraian di muka, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tingkat nasional dinamika tingkat kemiskinan di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa periode di mana pertumbuhan ekonomi diwarnai dengan peningkatan kemiskinan.
2. Tingkat kemiskinan yang terjadi dalam ruang lingkup sektor usaha yang bersangkutan (dalam hal ini diukur dengan HCR dan IGR sektoral) pada umumnya relatif tinggi. Namun jika HCR dibobot dengan *employment share* (diukur dengan HCR tertimbang) dan IGR dibobot dengan porsi penduduk miskin di masing-masing sektor usaha terhadap penduduk miskin Indonesia

(diukur dengan IGR tertimbang), terlihat bahwa kemiskinan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan adalah yang paling tinggi.

3. Hasil perhitungan tingkat kemiskinan sektoral-regional menunjukkan bahwa hampir di semua daerah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar bagi tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Hasil regresi model HCR tertimbang menunjukkan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di tingkat nasional sangat tinggi, yakni mencapai -2,97. Hal ini berarti tiap pertumbuhan sebesar 1% di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan akan dapat mengurangi kemiskinan nasional sebesar 2,97%. Sementara itu hasil regresi model HCR sektoral menunjukkan bahwa elastisitas sektor tersebut dalam mengurangi kemiskinan di sektor yang bersangkutan sebesar -7,34. Kedua besaran elastisitas tersebut jauh di atas besaran elastisitas sektor-sektor usaha lainnya, termasuk elastisitas sektor industri pengolahan yang masing-masing sebesar -0,11 dan -1,51.
5. Koefisien *share* GDP riil sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dan sektor industri pengolahan yang sama-sama bertanda negatif (pada regresi model HCR sektoral dan HCR tertimbang) mempunyai implikasi yang berbeda. Pada periode observasi *share* sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan mengalami penurunan, sedangkan *share* sektor industri pengolahan mengalami peningkatan. Naiknya *share* sektor industri pengolahan dalam hal ini akan mengurangi kemiskinan, sedangkan turunnya *share* sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan tentunya membuat naiknya tingkat kemiskinan.
6. Hasil regresi model IGR tertimbang juga menunjukkan bahwa sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan sektor usaha yang elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonominya paling tinggi, yakni sebesar -1,01. Besaran tersebut menunjukkan bahwa tiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan dapat menurunkan IGR sebesar 1,01%. Berdasarkan regresi atas model IGR sektoral, terlihat bahwa besaran elastisitas sektor tersebut juga yang tertinggi, yakni -1,75. Sementara itu pengaruh variabel *share* GDP riil terlihat bervariasi antar sektor usaha.

## V.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dari hasil pengolahan data dan regresi tersebut diketahui bahwa sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan tidak saja merupakan sektor usaha yang paling tinggi tingkat kemiskinannya, tapi juga mempunyai elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi

paling tinggi. Di samping itu penurunan *share* sektor usaha tersebut juga turut memperburuk tingkat kemiskinan Indonesia. Dengan demikian langkah yang paling tepat untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan perhatian lebih pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

2. Hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi studi-studi lain tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahluwalia, Montek S.; Carter, Nicholas G.; dan Chenery, Hollis B. "Growth and Poverty in Developing Countries." *Journal of Development Economics*, 1979, 6, 299-341.
- Balke, Nathan S. dan Slottje, Daniel J. "Poverty and Change in the Macroeconomy: A Dynamic Macroeconometric Model." *The Review of Economics and Statistics*, Februari 1993, 75(1), 117-122.
- Bigsten, Arne dan Levin, Jörgen. "Growth, Income Distribution, and Poverty: A Review." *Göteborg University Working Paper in Economics*, No. 32, November 2000.
- Bigsten, Arne dan Shimeles, Abebe. "Can Africa Reduce Poverty by Half by 2015? The Case for a Pro-Poor Growth Strategy." Göteborg University, Agustus 2005.
- Bourguignon, Francois. "The Growth Elasticity of Poverty Reduction: Explaining Heterogeneity across Countries and Time Periods." *DELTA Working Paper*, No. 2002-03, 2002.
- Datt, Gaurav dan Ravallion, Martin. "Is India's Economic Growth Leaving the Poor Behind?" *World Bank Policy Research Working Paper*, Mei 2002.
- de Janvry, Alain dan Sadoulet, Elisabeth. "Growth, Poverty, and Inequality in Latin America: A Causal Analysis, 1970-94, IADB, Februari 1999.
- Deininger, Klaus dan Squire, Lyn. "New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth." *Journal of Development Economics*, 1998, 57(1998), 259-287.
- Friedman, Jed. "How Responsive is Poverty to Growth? A Regional Analysis of Poverty, Inequality, and Growth in Indonesia, 1984-1999." RAND, 2002.
- Hoeven, Rolph van der. "Poverty and Structural Adjustment: Some Remarks on Tradeoffs between Equity and Growth." *ILO Employment Paper*, No. 2004/4, 2004.
- Huppi, Monika dan Ravallion, Martin. "The Sectoral Structure of Poverty during an Adjustment Period: Evidence for Indonesia in the Mid-1980s." *World Bank Working Papers*, No. WPS 529, Oktober 1990.

Knowles, Stephen. "Inequality and Economic Growth: The Empirical Relationship Reconsidered in the Light of Comparable Data." *WIDER Discussion Paper*, No. 2001/128, November 2001.

Osmani, S.R. "The Employment Nexus between Growth and Poverty: An Asian Perspective." SIDA-UNDP, Maret 2004.

Ravallion, Martin. "Growth, Inequality, and Poverty: Looking Beyond Averages." World Bank, 2001.

Ravallion, Martin dan Chen, Shaohua. "Measuring Pro-Poor Growth." *Economics Letters*, 2003, 78(2003), 93-99.

Ravallion, Martin dan Datt, Gaurav. "When is Growth Pro-Poor? Evidence from the Diverse Experiences of India's States." World Bank, 1999.

Ray, Debraj. *Development Economics*. New Jersey: Princeton University Press, 1998.

**LAMPIRAN IV.A****Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 1994 - 2006**

No.	Sektor	Periode												
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	0,56	4,38	3,14	1,00	1,33	2,16	1,88	3,26	3,45	3,79	2,82	2,66	2,98
2	Pertambangan dan Penggalian	5,60	6,74	6,30	2,12	2,76	1,62	5,51	0,33	1,00	1,37	4,48	3,11	2,21
3	Industri Pengolahan	12,36	10,88	11,59	5,25	11,44	3,92	5,98	3,30	5,29	5,33	6,38	4,57	4,63
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	12,54	15,91	13,63	12,37	3,03	8,27	7,56	7,92	8,94	4,87	5,30	6,30	5,87
5	Konstruksi	14,86	12,92	12,76	7,36	36,44	1,91	5,64	4,58	5,48	6,10	7,49	7,42	8,97
6	Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	7,61	7,94	8,16	5,83	18,22	0,06	5,67	3,95	4,27	5,45	5,70	8,38	6,13
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	8,34	8,50	8,68	7,01	15,13	0,75	8,59	8,10	8,39	12,19	13,38	12,97	13,64
8	Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	10,17	11,04	6,04	5,93	26,63	7,19	4,59	6,76	6,70	6,73	7,66	6,79	5,65
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	2,77	3,27	3,40	3,62	3,85	1,94	2,33	3,24	3,75	4,41	5,38	5,05	6,22
	<b>Total</b>	<b>7,54</b>	<b>8,22</b>	<b>7,82</b>	<b>4,70</b>	<b>13,13</b>	<b>0,79</b>	<b>4,92</b>	<b>3,64</b>	<b>4,50</b>	<b>4,78</b>	<b>5,03</b>	<b>5,68</b>	<b>5,48</b>

## LAMPIRAN IV.B

## Share GDP Riil Sektoral Tahun 1994 - 2006

No.	Sektor	Periode												
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	15,68	15,12	14,47	13,96	15,85	16,07	15,60	15,54	15,39	15,24	14,92	14,49	14,15
2	Pertambangan dan Penggalian	11,58	11,42	11,26	10,98	12,29	12,00	12,07	11,68	11,29	10,63	9,66	9,43	9,14
3	Industri Pengolahan	24,51	25,12	25,99	26,13	26,64	27,47	27,75	27,65	27,86	28,01	28,37	28,07	27,84
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0,38	0,41	0,43	0,46	0,55	0,59	0,60	0,63	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
5	Konstruksi	6,87	7,17	7,50	7,69	5,62	5,47	5,51	5,56	5,61	5,68	5,82	5,91	6,11
6	Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	16,99	16,94	17,00	17,18	16,17	16,04	16,15	16,20	16,16	16,26	16,37	16,79	16,89
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	4,55	4,56	4,60	4,70	4,59	4,52	4,68	4,88	5,06	5,42	5,85	6,25	6,74
8	Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	10,50	10,77	10,59	10,72	9,05	8,33	8,31	8,56	8,74	8,90	9,12	9,22	9,23
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	9,44	9,01	8,64	8,55	9,46	9,57	9,34	9,30	9,23	9,20	9,23	9,18	9,24

**LAMPIRAN IV.C****Tingkat Kemiskinan Regional-Sektoral Tahun 2006**

No.	Propinsi	Sektor	Ukuran Kemiskinan			
			HCR		IGR	
			% Sektoral	% Tertimbang	% Sektoral	% Tertimbang
1	NAD	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	17,57	9,03	17,29	12,04
2		Pertambangan dan Penggalian	10,17	0,32	17,62	0,46
3		Industri Pengolahan	6,62	0,26	16,94	0,35
4		Listrik, Gas, dan Air Minum	5,74	0,02	24,79	0,03
5		Konstruksi	12,42	0,87	16,46	1,16
6		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	6,48	0,79	15,76	1,02
7		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	12,44	0,77	17,68	1,09
8		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	1,97	0,02	25,88	0,05
9		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	4,68	0,67	20,57	1,13
10		Lainnya	10,81	0,03	14,65	0,03
				<b>12,78</b>	<b>17,36</b>	
11	Sumatera Utara	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	21,47	11,21	17,87	11,45
12		Pertambangan dan Penggalian	6,24	0,18	19,90	0,22
13		Industri Pengolahan	10,17	0,47	15,94	0,50
14		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Konstruksi	19,68	0,86	15,62	0,90
16		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	9,99	1,50	16,85	1,70
17		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	18,91	1,52	15,93	1,65
18		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	3,15	0,03	12,70	0,03
19		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	6,93	0,76	16,14	0,80
20		Lainnya	9,27	0,05	19,48	0,06
			<b>16,59</b>	<b>17,31</b>		
21	Sumatera Barat	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	28,98	12,61	21,84	11,31
22		Pertambangan dan Penggalian	14,94	1,09	18,09	0,91
23		Industri Pengolahan	19,10	0,97	21,79	0,97
24		Listrik, Gas, dan Air Minum	11,32	0,05	13,53	0,03
25		Konstruksi	32,29	1,48	19,96	1,38
26		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	17,11	2,84	19,76	2,72
27		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	21,72	1,64	18,74	1,44
28		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	6,62	0,06	10,89	0,03
29		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	13,92	1,94	20,47	1,98
30		Lainnya	13,56	0,02	15,50	0,01
			<b>22,69</b>		<b>20,80</b>	

No.	Propinsi	Sektor	Ukuran Kemiskinan			
			HCR		IGR	
			% Sektoral	% Tertimbang	% Sektoral	% Tertimbang
31	Riau	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	23,59	12,31	18,51	11,34
32		Pertambangan dan Penggalian	13,30	0,55	24,47	0,73
33		Industri Pengolahan	15,40	0,93	16,02	0,81
34		Listrik, Gas, dan Air Minum	9,71	0,03	18,42	0,04
35		Konstruksi	19,21	1,03	19,74	1,12
36		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	13,12	1,83	20,53	2,11
37		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	24,21	1,69	22,90	2,18
38		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	3,00	0,03	5,42	0,01
39		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	8,77	0,85	17,77	0,84
40		Lainnya	50,00	0,02	4,10	0,01
				<b>19,30</b>		<b>19,18</b>
41	Jambi	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	13,73	8,81	17,96	12,14
42		Pertambangan dan Penggalian	10,55	0,33	16,45	0,47
43		Industri Pengolahan	15,72	0,77	15,79	1,01
44		Listrik, Gas, dan Air Minum	19,40	0,05	11,96	0,06
45		Konstruksi	15,78	0,57	19,04	0,98
46		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	7,99	0,80	19,67	1,49
47		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	13,61	0,56	21,47	1,08
48		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	2,98	0,02	12,84	0,02
49		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	5,82	0,53	21,18	0,99
50		Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>12,44</b>		<b>18,25</b>
51	Sumatera Selatan	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	16,67	9,80	16,96	8,84
52		Pertambangan dan Penggalian	10,46	0,35	17,04	0,38
53		Industri Pengolahan	15,77	0,55	13,99	0,49
54		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Konstruksi	32,03	1,41	20,86	2,05
56		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	13,17	1,65	17,96	2,04
57		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	22,58	1,50	20,29	2,12
58		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	8,37	0,05	11,30	0,04
59		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	14,89	1,43	19,48	1,91
60		Lainnya	11,17	0,06	10,70	0,04
				<b>16,80</b>		<b>17,91</b>
61	Bengkulu	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	16,39	11,05	15,10	11,47
62		Pertambangan dan Penggalian	3,70	0,10	14,59	0,12
63		Industri Pengolahan	8,45	0,22	20,49	0,44
64		Listrik, Gas, dan Air Minum	12,77	0,03	5,23	0,01
65		Konstruksi	19,18	0,61	20,43	1,05
66		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	8,47	0,76	15,65	1,07
67		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	6,46	0,24	6,46	0,13
68		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	7,02	0,73	19,23	1,26
70		Lainnya	9,00	0,04	46,01	0,18
				<b>13,78</b>		<b>15,73</b>

No.	Propinsi	Sektor	Ukuran Kemiskinan			
			HCR		IGR	
			% Sektoral	% Tertimbang	% Sektoral	% Tertimbang
71	Lampung	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	25,64	14,23	18,02	10,97
72		Pertambangan dan Penggalian	19,47	0,63	20,06	0,60
73		Industri Pengolahan	20,37	1,33	18,56	1,15
74		Listrik, Gas, dan Air Minum	18,75	0,05	18,38	0,05
75		Konstruksi	28,84	1,45	21,98	1,64
76		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	13,88	1,73	17,76	1,56
77		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	22,68	1,26	18,87	1,25
78		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	8,47	0,07	24,53	0,09
79		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	11,87	1,26	22,60	1,45
80		Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>22,00</b>		<b>18,76</b>
81	Kep, Bangka Belitung	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	12,74	3,40	12,22	5,72
82		Pertambangan dan Penggalian	5,29	1,78	14,31	3,59
83		Industri Pengolahan	4,86	0,23	21,95	0,77
84		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
85		Konstruksi	6,76	0,47	14,04	0,98
86		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	4,13	0,52	19,66	1,53
87		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	3,35	0,15	12,55	0,26
88		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	0,00	0,00	0,00	0,00
89		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	5,47	0,52	18,25	1,43
90		Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>7,08</b>		<b>14,27</b>
91	Kep, Riau	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	32,53	10,18	21,27	10,25
92		Pertambangan dan Penggalian	16,72	1,64	21,93	1,87
93		Industri Pengolahan	16,64	2,02	25,25	2,64
94		Listrik, Gas, dan Air Minum	16,13	0,07	35,71	0,14
95		Konstruksi	23,90	1,72	21,01	1,90
96		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	9,07	1,34	18,19	1,26
97		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	17,07	1,64	19,49	1,67
98		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	3,08	0,03	6,36	0,01
99		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	10,51	1,38	25,19	1,79
100		Lainnya	20,73	0,12	19,10	0,13
				<b>20,15</b>		<b>21,65</b>
101	DKI Jakarta	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	38,14	1,25	11,86	2,46
102		Pertambangan dan Penggalian	5,78	0,26	19,68	0,84
103		Industri Pengolahan	3,43	0,54	8,89	0,79
104		Listrik, Gas, dan Air Minum	2,19	0,03	7,40	0,03
105		Konstruksi	7,30	0,37	15,23	0,94
106		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	4,25	1,43	15,31	3,63
107		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	6,61	0,64	18,72	2,00
108		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	1,98	0,15	22,35	0,56
109		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	6,92	1,34	18,19	4,05
110		Lainnya	21,43	0,02	28,47	0,11
				<b>6,02</b>		<b>15,40</b>

No.	Propinsi	Sektor	Ukuran Kemiskinan			
			HCR		IGR	
			% Sektoral	% Tertimbang	% Sektoral	% Tertimbang
111	Jawa Barat	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	28,79	6,00	18,73	5,95
112		Pertambangan dan Penggalian	15,26	1,06	18,68	1,12
113		Industri Pengolahan	14,34	2,14	16,50	2,01
114		Listrik, Gas, dan Air Minum	6,87	0,02	13,57	0,02
115		Konstruksi	26,28	1,91	20,34	2,21
116		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	14,05	3,35	18,30	3,51
117		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	17,31	1,59	17,86	1,66
118		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	3,75	0,07	15,99	0,07
119		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	11,35	1,55	19,27	1,75
120		Lainnya	16,69	0,18	17,82	0,19
				17,87		18,49
121	Jawa Tengah	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	34,79	11,23	18,29	8,17
122		Pertambangan dan Penggalian	16,10	0,89	18,24	0,68
123		Industri Pengolahan	21,86	3,24	16,82	2,31
124		Listrik, Gas, dan Air Minum	9,38	0,03	4,31	0,00
125		Konstruksi	28,85	2,60	17,33	1,92
126		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	17,00	3,17	16,95	2,30
127		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	25,23	1,51	18,39	1,21
128		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	6,52	0,08	11,77	0,04
129		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	11,75	1,39	15,96	0,96
130		Lainnya	9,52	0,04	14,50	0,03
				24,17		17,62
131	DI Yogyakarta	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	28,06	8,19	15,79	6,52
132		Pertambangan dan Penggalian	5,89	0,64	16,06	0,57
133		Industri Pengolahan	22,47	1,97	17,28	1,88
134		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
135		Konstruksi	33,40	3,83	16,16	3,39
136		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	12,68	1,99	11,91	1,40
137		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	21,71	1,10	18,06	1,19
138		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	2,41	0,04	15,60	0,04
139		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	4,79	0,81	18,79	0,88
140		Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,58		15,87
141	Jawa Timur	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	38,23	14,53	21,13	11,20
142		Pertambangan dan Penggalian	19,10	1,25	18,38	0,87
143		Industri Pengolahan	20,14	2,50	18,41	1,77
144		Listrik, Gas, dan Air Minum	8,45	0,03	26,23	0,03
145		Konstruksi	32,01	2,03	19,08	1,50
146		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	17,48	2,93	18,75	2,15
147		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	26,55	1,78	19,14	1,32
148		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	8,15	0,12	21,12	0,10
149		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	12,90	1,47	19,26	1,12
150		Lainnya	25,00	0,01	28,58	0,01
				26,65		20,07

No.	Propinsi	Sektor	Ukuran Kemiskinan			
			HCR		IGR	
			% Sektoral	% Tertimbang	% Sektoral	% Tertimbang
151	Banten	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	22,68	5,76	19,41	8,30
152		Pertambangan dan Penggalian	7,07	0,33	15,57	0,41
153		Industri Pengolahan	7,90	1,59	17,63	2,30
154		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
155		Konstruksi	17,09	1,03	20,16	1,69
156		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	10,46	2,01	15,95	2,58
157		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	10,93	1,11	14,65	1,33
158		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	2,31	0,05	11,40	0,05
159		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	8,00	0,91	12,11	0,91
160		Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Bali	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	12,19	3,41	13,84	5,43
162		Pertambangan dan Penggalian	7,23	0,18	8,29	0,18
163		Industri Pengolahan	11,05	1,44	15,24	2,62
164		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
165		Konstruksi	13,12	1,53	15,09	2,81
166		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	4,88	1,00	10,84	1,32
167		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	5,88	0,32	14,09	0,56
168		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	1,51	0,04	5,37	0,03
169		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	3,27	0,50	16,71	1,00
170		Lainnya	7,55	0,02	6,52	0,01
				<b>8,46</b>	<b>13,95</b>	
171	NTB	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	26,91	11,63	18,23	8,70
172		Pertambangan dan Penggalian	16,70	1,20	18,89	1,01
173		Industri Pengolahan	21,88	1,41	21,50	1,46
174		Listrik, Gas, dan Air Minum	14,75	0,04	11,14	0,02
175		Konstruksi	26,83	1,62	21,46	1,71
176		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	18,20	2,52	19,75	2,45
177		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	25,92	2,18	19,30	2,01
178		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	6,67	0,07	21,46	0,07
179		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	13,01	1,72	22,10	1,90
180		Lainnya	13,64	0,04	19,17	0,04
				<b>22,43</b>	<b>19,38</b>	
181	NTT	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	42,33	29,39	20,51	16,22
182		Pertambangan dan Penggalian	16,54	0,51	14,90	0,26
183		Industri Pengolahan	31,60	1,02	20,87	0,62
184		Listrik, Gas, dan Air Minum	9,64	0,02	10,62	0,01
185		Konstruksi	37,54	1,00	22,99	0,79
186		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	25,93	1,28	19,49	0,88
187		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	26,24	0,88	22,84	0,72
188		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	11,04	0,08	13,93	0,03
189		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	11,03	1,33	19,28	0,88
190		Lainnya	28,47	0,09	16,01	0,04
				<b>35,61</b>	<b>20,45</b>	

No.	Propinsi	Sektor	Ukuran Kemiskinan			
			HCR		IGR	
			% Sektoral	% Tertimbang	% Sektoral	% Tertimbang
191	Kalimantan Barat	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	15,63	9,49	17,35	9,99
192		Pertambangan dan Penggalian	13,39	0,64	20,26	1,03
193		Industri Pengolahan	16,80	0,59	16,54	0,73
194		Listrik, Gas, dan Air Minum	8,22	0,02	25,15	0,04
195		Konstruksi	21,30	1,13	23,29	2,09
196		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	10,00	1,12	17,51	1,61
197		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	20,52	0,72	15,75	0,92
198		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	5,77	0,04	11,20	0,03
199		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	9,07	0,87	18,99	1,35
200		Lainnya	32,90	0,16	14,75	0,21
				14,78		17,99
201	Kalimantan Tengah	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	12,52	7,48	17,96	12,83
202		Pertambangan dan Penggalian	5,85	0,36	11,39	0,41
203		Industri Pengolahan	11,59	0,43	19,30	0,82
204		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
205		Konstruksi	13,43	0,66	12,74	0,85
206		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	5,19	0,50	15,37	0,79
207		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	6,94	0,36	14,23	0,53
208		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	3,35	0,02	26,04	0,04
209		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	4,68	0,47	18,45	0,92
210		Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,27		17,19
211	Kalimantan Selatan	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	12,89	5,69	16,35	8,60
212		Pertambangan dan Penggalian	5,96	0,46	11,71	0,57
213		Industri Pengolahan	9,94	0,65	16,37	1,12
214		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
215		Konstruksi	11,03	0,61	11,93	0,82
216		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	6,85	1,09	13,23	1,61
217		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	11,09	0,71	20,47	1,58
218		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	6,74	0,06	16,82	0,10
219		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	5,74	0,71	15,08	1,25
220		Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,98		15,66
221	Kalimantan Timur	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	30,50	11,41	22,11	15,17
222		Pertambangan dan Penggalian	5,24	0,49	16,34	0,47
223		Industri Pengolahan	9,11	0,70	21,64	0,90
224		Listrik, Gas, dan Air Minum	11,21	0,04	12,85	0,03
225		Konstruksi	13,89	0,96	14,13	0,81
226		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	7,66	1,17	17,54	1,22
227		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	12,36	0,79	19,89	0,93
228		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	3,47	0,09	24,11	0,13
229		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	6,72	0,93	17,51	0,97
230		Lainnya	46,58	0,11	19,67	0,13
				16,69		20,76

No.	Propinsi	Sektor	Ukuran Kemiskinan			
			HCR		IGR	
			% Sektoral	% Tertimbang	% Sektoral	% Tertimbang
231	Sulawesi Utara	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	27,35	12,49	20,34	13,57
232		Pertambangan dan Penggalian	6,34	0,41	17,83	0,41
233		Industri Pengolahan	12,03	0,69	12,16	0,46
234		Listrik, Gas, dan Air Minum	5,49	0,02	0,13	0,00
235		Konstruksi	24,64	2,08	18,04	2,12
236		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	8,87	0,87	14,80	0,72
237		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	11,30	0,95	17,61	0,96
238		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	1,46	0,01	11,65	0,01
239		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	5,79	0,78	17,47	0,76
240		Lainnya	22,58	0,10	17,70	0,10
241	Sulawesi Tengah	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan		18,42		19,11
242		Pertambangan dan Penggalian	37,06	23,46	20,49	15,37
243		Industri Pengolahan	19,42	0,55	25,31	0,47
244		Listrik, Gas, dan Air Minum	33,33	1,30	18,39	0,83
245		Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
246		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	33,04	1,19	19,76	0,86
247		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	12,75	1,02	16,97	0,66
248		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	27,37	1,12	18,62	0,77
249		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	5,85	0,04	20,14	0,03
250		Lainnya	12,61	1,64	17,86	1,04
		27,40	0,08	5,71	0,02	
251	Sulawesi Selatan	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan		30,41		20,04
252		Pertambangan dan Penggalian	27,49	14,12	18,58	12,20
253		Industri Pengolahan	10,80	0,66	16,78	0,55
254		Listrik, Gas, dan Air Minum	14,94	0,64	17,99	0,57
255		Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
256		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	25,10	1,04	18,10	0,98
257		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	12,20	1,50	16,34	1,27
258		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	23,70	1,59	18,17	1,51
259		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	6,31	0,09	5,56	0,03
260		Lainnya	8,05	1,06	18,23	1,03
		14,29	0,04	22,64	0,04	
261	Sulawesi Tenggara	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan		20,73		18,19
262		Pertambangan dan Penggalian	27,45	13,99	20,19	12,51
263		Industri Pengolahan	21,01	1,06	23,57	1,16
264		Listrik, Gas, dan Air Minum	24,24	1,37	19,56	1,23
265		Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
266		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	21,23	0,95	15,54	0,72
267		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	14,83	1,69	19,99	1,67
268		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	24,52	1,60	23,31	1,93
269		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00
270		Lainnya	7,10	1,07	19,65	1,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			21,73		20,32	

No.	Propinsi	Sektor	Ukuran Kemiskinan			
			HCR		IGR	
			% Sektoral	% Tertimbang	% Sektoral	% Tertimbang
271	Gorontalo	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	27,68	13,88	18,95	12,88
272		Pertambangan dan Penggalian	15,24	0,70	16,81	0,60
273		Industri Pengolahan	16,93	1,10	16,28	0,92
274		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
275		Konstruksi	19,52	1,27	13,44	0,96
276		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	9,44	0,92	17,78	0,93
277		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	12,06	1,01	12,94	0,70
278		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	0,00	0,00	0,00	0,00
279		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	6,40	0,81	17,34	0,79
280		Lainnya	32,26	0,08	7,94	0,04
281		Sulawesi Barat	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan		19,78	
282	Pertambangan dan Penggalian		29,19	20,85	21,25	15,83
283	Industri Pengolahan		22,53	0,49	18,91	0,34
284	Listrik, Gas, dan Air Minum		20,04	0,70	18,47	0,53
285	Listrik, Gas, dan Air Minum		55,56	0,07	11,81	0,03
286	Konstruksi		35,63	0,92	19,11	0,72
287	Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi		22,00	1,37	12,33	0,66
288	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi		39,37	1,76	20,10	1,48
289	Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.		10,87	0,07	20,94	0,07
290	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan		11,34	0,98	18,38	0,69
291	Maluku	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
291		Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan		27,22		20,35
292		Pertambangan dan Penggalian	38,12	23,95	23,15	18,44
293		Pertambangan dan Penggalian	16,27	0,48	18,30	0,33
294		Industri Pengolahan	31,12	1,67	19,82	1,10
295		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
296		Konstruksi	27,76	0,76	13,18	0,37
297		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	11,54	0,73	21,19	0,53
298		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	15,49	0,83	16,26	0,48
299		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	4,41	0,04	13,02	0,02
300	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	9,90	1,31	19,43	0,90	
301	Maluku Utara	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
301		Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan		29,78		22,16
302		Pertambangan dan Penggalian	16,49	9,70	19,00	13,71
303		Pertambangan dan Penggalian	8,77	0,40	21,89	0,82
304		Industri Pengolahan	23,17	1,20	16,61	1,58
305		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
306		Konstruksi	7,41	0,37	23,17	0,85
307		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	3,83	0,28	17,34	0,40
308		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	6,94	0,48	14,67	0,67
309		Kuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	3,17	0,37	20,31	0,81	
310	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12,79		18,85	

No.	Propinsi	Sektor	Ukuran Kemiskinan			
			HCR		IGR	
			% Sektoral	% Tertimbang	% Sektoral	% Tertimbang
311	Irian Jaya Barat	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	35,31	22,46	21,58	18,16
312		Pertambangan dan Penggalian	12,20	0,21	27,83	0,24
313		Industri Pengolahan	13,95	0,43	17,06	0,29
314		Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
315		Konstruksi	11,58	0,46	18,24	0,34
316		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	8,66	0,72	19,28	0,56
317		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	10,27	0,60	18,44	0,46
318		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	0,00	0,00	0,00	0,00
319		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	12,38	1,55	16,06	0,97
320		Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Papua	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	45,65	31,19	27,03	24,92
322		Pertambangan dan Penggalian	3,66	0,07	25,43	0,06
323		Industri Pengolahan	12,42	0,18	24,54	0,14
324		Listrik, Gas, dan Air Minum	10,42	0,02	8,92	0,01
325		Konstruksi	7,86	0,18	14,25	0,09
326		Perdagangan, RM, dan Jasa Akomodasi	3,08	0,14	10,69	0,05
327		Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	8,83	0,56	20,38	0,35
328		Keuangan, R. Estat, Persewaan, dan Jasa Persh.	5,98	0,05	19,22	0,03
329		Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	6,54	0,82	18,70	0,53
330		Lainnya	19,36	0,37	20,32	0,24
			<b>33,56</b>		<b>26,41</b>	

## PETUNJUK PENULISAN

1. Naskah harus merupakan karya asli penulis (perorangan, kelompok atau institusi) yang tidak melanggar hak cipta. Naskah yang dikirimkan, belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dikirimkan ke penerbit lain pada waktu yang bersamaan. Hak cipta atas naskah yang diterima, TETAP menjadi hak penulis.
2. Setiap naskah yang disetujui untuk diterbitkan, akan mendapatkan kompensasi finansial sebesar Rp 1.000.000,- s.d. Rp 3.000.000,-.
3. Naskah dapat dikirimkan dalam bentuk *softcopy*(file). Sangat disarankan untuk mengirimkan *softcopy* anda ke:

submission.bemp@gmail.com

Jika tidak memungkinkan, file tersebut dapat disimpan dalam disket atau CD dan dikirimkan melalui pos ke alamat redaksi berikut:

**BULETIN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN**  
**Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia**  
**Gedung B, Lt. 20, Jl. M. H. Thamrin No.2**  
**Jakarta Pusat, INDONESIA Telpon: 62-21-3818202, Fax: 62-21-3800394**

4. Naskah dibatasi ± 25 halaman berukuran A4, spasi satu (1), *font* Times New Roman dengan ukuran font 12.
5. Persamaan matematis dan simbol harap ditulis dengan mempergunakan *Microsoft Equation*.
6. Setiap naskah harus disertai abstraksi, maksimal satu (1) halaman ukuran A4. Untuk naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, abstraksi-nya ditulis dalam Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
7. Naskah harus disertai dengan kata kunci (*Keyword*) dan dua digit nomor Klasifikasi *Journal of Economic Literature* (JEL). Lihat klasifikasi JEL pada, [http:// www.acaweb.org/journal/jel class system.html](http://www.acaweb.org/journal/jel_class_system.html).
8. Naskah ditulis dengan penyusunan BAB secara konsisten sebagai berikut,

## **I. JUDUL BAB**

### **I.1. Sub Bab**

#### **I.1.1. Sub Sub Bab**

9. Rujukan dibuat dalam footnote (catatan kaki) dan bukan endnote.

10. Sistem referensi dibuat mengikuti aturan berikut,

**a. Publikasi buku:**

*John E. Hanke dan Arthur G. Reitsch, (1940), Business Forecasting, PrenticeHall, New Jersey.*

**b. Artikel dalam jurnal:**

*Rangazas, Peter. "Schooling and Economic Growth: A King-Rebelo Experiment with Human Capital", Journal of Monetary Economics, Oktober 2000,46(2), hal. 397-416.*

**c. Artikel dalam buku yang diedit orang lain:** *Frankel, Jeffrey A. dan Rose, Andrew K. "Empirical Research on Nominal Exchange Rates", dalam Gene Grossman dan Kenneth Rogoff, eds., Handbook of International Economics. Amsterdam: North-Holland, 1995, hal. 397-416.*

**d. Kertas kerja (working papers):**

*Kremer, Michael dan Chen, Daniel. "Income Distribution Dynamics with Endogenous Fertility". National Bureau of Economic Research (Cambridge, MA) Working Paper No.7530, 2000.*

**e. Mimeo dan karya tak dipublikasikan:** *Knowles, John. "Can Parental Decision Explain U.S. Income Inequality?", Mimeo, University of Pennsylvania, 1999.*

**f. Artikel dari situs WEB dan bentuk elektronik lainnya:** *Summers, Robert dan Heston, Alan W. "Penn World Table, Version 5.6" "http://pwtecon.unpenn.edu/, 1997.*

**g. Artikel di koran, majalah dan periodicals sejenis:** *Begley, Sharon. "Killed by Kindness", Newsweek, April 12, 1993, hal. 50-56.*

11. Naskah harus disertai dengan biodata penulis, lengkap dengan alamat, telepon, rekening Bank dan e-mail yang dapat dihubungi. Disarankan untuk menulis biodata dalam bentuk CV (*curriculum vitae*) lengkap.